

DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN SAMOSIR

Megawati F Nadeak¹, Darwin Damanik², Bagudek Tumanggor³

megawati.nadeak@gmail.com¹, darwin.damanik@gmail.com², bagudektumanggor67@gmail.com³

^{1,2,3}Universitas Simalungun

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis derajat desentralisasi fiskal dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Samosir. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier sederhana ordinary least square. Data yang digunakan adalah data sekunder (time series) yang diperoleh dari Badan Pusat Statisti (BPS) Kabupaten Samosir dari tahun 2005-2020. Variabel yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi (variabel terikat) dan derajat desentralisasi fiskal (variabel bebas). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata derajat desentralisasi fiskal di Kabupaten Samosir periode tahun 2006 - 2020 masih tergolong sangat kurang yaitu sebesar 5,53%, Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Samosir, dan juga Koefisien Determinasi (R²) yaitu 0,2937, menunjukkan bahwa variasi variabel DDF dapat menjelaskan variabel Pertumbuhan Ekonomi sebesar 29,37%. Artinya DDF terhadap Pertumbuhan Ekonomi dapat dijelaskan sebesar 29,37%, sedangkan sisanya 70,63% dapat dijelaskan oleh variabel lainnya
Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Derajat Desentralisasi Fiskal, Keuangan Daerah

ABSTRACT

This study aims to analyze the degree of fiscal decentralization and its effect on economic growth in Samosir Regency. The method used in this study is a quantitative method with a simple linear regression analysis technique of ordinary least squares. The data used is secondary data (time series) obtained from the Central Statistics Agency (BPS) of Samosir Regency from 2005-2020. The variables used are economic growth (the dependent variable) and the degree of fiscal decentralization (the independent variable). The results show that the average degree of fiscal decentralization in Samosir Regency for the period 2006 - 2020 is still very low at 5.53%, the Degree of Fiscal Decentralization (DDF) has a positive and significant effect on Economic Growth in Samosir Regency, and also the Coefficient of Determination (R²) is 0.2937, indicating that the variation of the DDF variable can explain the variable Economic Growth of 29.37%. This means that DDF on Economic Growth can be explained by 29.37%, while the remaining 70.63% can be explained by other variables

Keywords: Economic growth, Degree of Fiscal Decentralization, Regional Finance

PENDAHULUAN

Sampai saat ini, desentralisasi fiskal dan otonomi daerah merupakan topik pembicaraan yang selalu menarik untuk didiskusikan. Ini disebabkan studi tentang desentralisasi fiskal tidak hanya menjadi ranah ekonomi, tetapi memiliki keterkaitan erat dengan dimensi lain seperti politik, administratif, dan geografis. Sebagian ekonom percaya bahwa desentralisasi fiskal mendorong pertumbuhan, memperbaiki pemerataan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat (Saputra, 2013) Selain itu hasil studi desentralisasi fiskal seringkali tidak menghasilkan kesimpulan yang sama diantara para peneliti dan peminat desentralisasi. Ada

silang pendapat dengan masing - masing pihak memiliki argumentasi logis serta telah membuktikannya secara empiris. Dekade terakhir telah menyaksikan tren dunia desentralisasi fiskal di negara-negara berkembang sebagai pelarian dari pertumbuhan yang tidak memadai dan pemerintahan yang tidak efisien (Zhao, & Zou, 2014)

Dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, hasil studi dari beberapa ahli seperti (Zhang & Zou, 1998) serta (Phillips & Woller, 1997) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal tidak mempunyai dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Negara - negara berkembang. Lebih jauh, (Zhang & Zou, 1998) serta (Xie, Davidson III, & DaDalt, 2003)

mendapatkan hasil bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kurang mengantungkan bagi pembangunan. Sebaliknya, hasil studi (Iimi, 2005) dan (Malik dkk, 2006) menunjukkan hasil berbeda, yakni bahwa desentralisasi fiskal mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi

Isu desentralisasi fiskal sebagai jalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi telah menarik perhatian banyak ahli, seperti (Oates, 1993); (Bird, 1993); (Bird, Ebel, & Wallich, 1995); (Martinez-Vazquez, McNab, & Georgia State University, 1997); (Bahl & Linh, 1992); dan (Gramlich, 1993). Mereka menyatakan bahwa dengan diserahkannya beberapa kewenangan kepada pemerintah daerah, diharapkan pelayanan masyarakat semakin efisien dan pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi

Kemudian juga dengan tegas dijelaskan oleh beberapa penelitian yang dilakukan oleh (Prud'homme, 1995), (Peterson, 1997), dalam penelitiannya di Amerika Serikat, (Phillips, K. L., & Woller, 1997) dan (Zhang & Zou, 2001) dalam penelitiannya di India, menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Di Indonesia hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wibowo, 2008)

Atas fenomena ini, (Breuss & Eller, 2004) menyatakan bahwa ada efek ambivalent dalam hubungan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi, sehingga sulit untuk menarik rekomendasi yang tepat tentang bagaimana desentralisasi yang optimal. Lebih lanjut Breuss dan Eller menyimpulkan bahwa tidak ada kejelasan, atau hubungan otomatis desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi

Dalam konteks Negara berkembang, mengutip pendapat Smith, (Hidayat, 2005) menjelaskan bahwa sedikitnya ada tiga alasan utama mengapa sebagian besar Negara berkembang menganggap penting untuk mengaplikasikan desentralisasi fiskal, yaitu; untuk menciptakan efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan, untuk memperluas otonomi daerah, dan pada beberapa kasus sebagai strategi untuk mengatasi instabilitas politik. Senada dengan itu (Hirawan, 2007) menyatakan bahwa otonomi daerah sebagai landasan dari pelaksanaan desentralisasi adalah untuk memenuhi tujuan demokratisasi dan demi

mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Artinya, kebijakan desentralisasi ini dimaksudkan untuk menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang demokratis dan memberikan pelayanan masyarakat yang jauh lebih baik. Dengan adanya kewenangan yang luas bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan, maka diharapkan tujuan pembangunan ekonomi yang sasaran akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat dapat lebih cepat tercapai.

Di Indonesia, desentralisasi fiskal dan otonomi daerah mulai hangat dibicarakan sejak bergulirnya era reformasi pasca runtuhnya tembok kekuasaan pemerintahan orde baru. Sistem pemerintahan sentralistis yang selama ini dianut pemerintahan presiden Soeharto dianggap tidak mampu membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat luas sehingga memunculkan tuntutan kewenangan yang lebih besar dari daerah untuk melaksanakan pembangunan. Tuntutan ini kemudian melahirkan undang - undang otonomi daerah, yaitu UU no. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dan sekaligus menjadi awal era baru desentralisasi fiskal di Indonesia. UU ini memberikan kewenangan kepada daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Bagian yang menjadi urusan Pemerintah Pusat hanya meliputi Politik Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter dan Fiskal, serta Agama

Kabupaten Samosir merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang pada saat ini mengalami perkembangan sangat pesat dalam tata kelola pemerintahan daerah. Kabupaten yang menjadi bagian dari potensi pariwisata Indonesia di Provinsi Sumatera Utara dengan adanya Kawasan Danau Toba sebagai Obyek Wisata Premium Nasional

Pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah Kabupaten Samosir belumlah optimal. Dana-dana transfer yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tersebut diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah berbeda - beda, hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain perbedaan kepemilikan sumber daya alam, perbedaan jumlah penduduk, dan tenaga kerja yang berbeda antar daerah

Penelitian yang sama yaitu (Alisman & Sufriadi, 2020), (Lubis et al, 2017) yang menyatakan bahwa pengaruh derajat desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ada juga penelitian (Saputra & Mahmudi, 2012), (Astuti, et al 2018), (Soleh & Ahmad, 2018) yang menunjukkan bahwa yang menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi

TINJAUAN PUSTAKA

Pertumbuhan Ekonomi

(Sukirno, 2016), pertumbuhan ekonomi yaitu perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang di diproduksi dalam masyarakat bertambah. Pertumbuhan ekonomi juga didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan ekonomi yang berlaku dari waktu ke waktu dan menyebabkan pendapatan nasional riil semakin berkembang. Pertumbuhan ekonomi (economic growth) dipandang sebagai bagian terpenting dalam kebijakan ekonomi di negara maupun sistem ekonomi manapun (Muttaqin, 2018)

Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, diantaranya nilai impor dan juga kurs atau nilai tukar Rupiah. (Ismanto, Kristiani, & Rina, 2019) Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan daerah untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan ini disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang modal. Teknologi yang digunakan berkembang. Disamping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat pertambahan penduduk, dan pengalaman kerja serta pendidikan juga menambah keterampilan mereka

Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat penambahan faktor - faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh perrtambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Pertambahan potensi memproduksi kerap kali lebih besar daripada pertambahan produksi yang sebenarnya. Dengan demikian, perkembangan ekonomi adalah lebih lambat dari potensi nya. Tingkat pertumbuhan ekonomi

menunjukkan presentasi kenaikan pendapatan nasional riil pada suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya

Suatu daerah dengan tingkat sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda, pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu bukti keberhasilan pemerintah daerah dalam pengalokasian sumber daya yang ada. Pertumbuhan ekonomi membutuhkan sebuah peran strategi yaitu pembetulan modal. Pembentukan modal inilah yang bersumber dari kegiatan investasi atau pendanaan di sejumlah pasar uang (Habib, 2020). Tingkat pertumbuhan ekonomi dalam satu tahun dapat menggunakan rumus sebagaimana yang dijelaskan dalam (Sukirno, 2016) sebagai berikut :

$$g = \frac{PN - riil_t - PN - riil_0}{PN - riil_0} \times 100$$

Dimana :

- g = tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun t
 PN - riil_t = pendapatan nasional (PDRB) riil pada tahun t (1)
 PN - riil₀ = pendapatan nasional (PDRB) pada tahun sebelumnya

Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu yang biasanya satu tahun. Perhitungan pendapatan nasional bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang tingkat ekonomi yang sudah dicapai dalam suatu Negara (Yoshanda, 2020) Tujuan dari perhitungan pendapatan nasional adalah untuk memperoleh gambaran tentang tingkat ekonomi yang sudah dicapai dalam suatu negara. Secara kuantitatif, tingkat kehidupan dan kemajuan suatu negara ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pendapatan nasional dengan jumlah penduduk dalam suatu negara. Pendapatan nasional juga merupakan tolak ukur yang digunakan untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara (Basmar et al., 2021). Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi pada skala regional dalam periode tertentu salah satunya adalah melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB pada dasarnya merupakan nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu.

PDRB juga bisa diartikan sebagai nilai dari jumlah nilai barang dan jasa akhir (netto) yang dihasilkan oleh seluruh unit - unit ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu faktor penting untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan (Dama et al., 2016)

PDRB dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu PDRB atas dasar harga konstan dan PDRB atas dasar harga yang berlaku. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada tiap tahun. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun

Beberapa faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi (Rahayu, 2016), yaitu:

1. Faktor Sumber Daya Alam (SDA)

Sebagian negara berkembang bertumpu pada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun demikian, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud diantaranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut

2. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi Sumber Daya Manusia. SDM merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan

3. Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

Perkembangan IPTEK yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan

kuantitas serangkaian aktivitas ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian

4. Faktor Budaya

Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan. Faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet, dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat menghambat proses pembangunan diantaranya sikap anarkis, egois, boros, KKN, dan sebagainya

5. Sumber Daya Modal

Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas

Ada beberapa manfaat analisis pertumbuhan ekonomi antara lain untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional (Muta'ali, 2015) dalam jurnal (Damanik, Purba, & Hutabarat, 2021), yaitu :

- a) Mengembangkan tipologi pembangunan ekonomi daerah.
- b) Sebagai dasar untuk membuat proyeksi atau perkiraan pendapatan daerah untuk perencanaan pembangunan sektoral dan daerah.
- c) Mengetahui sumber-sumber pertumbuhan ekonomi.
- d) Sebagai dasar untuk merumuskan kebutuhan investasi
- e) Sebagai dasar untuk membuat perkiraan bisnis dan target ekonomi daerah

Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)

Menurut UU No. 32 Tahun 2004, Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Rahajeng, 2015)

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Desentralisasi Fiskal adalah penyerahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengurus

dan mengatur pemerintahannya sendiri dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pada sistem pemerintahan yang desentralisasi diwujudkan dengan sistem otonomi daerah yang memberikan wewenang yang tadinya harus diputuskan oleh pemerintah pusat sekarang dapat diputuskan oleh pemerintahan daerah. Kelebihan sistem ini adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa ada campur tangan pemerintah pusat. Namun kekurangan dari sistem desentralisasi pada otonomi khusus untuk daerah adalah euforia yang berlebihan di mana wewenang tersebut hanya mementingkan kepentingan kelompok dan golongan serta digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi. Hal ini terjadi karena sulit dikontrol pemerintah ditingkat pusat

Menurut (Kharisma, 2013) ada empat jenis desentralisasi, yaitu :

1) Desentralisasi Politik (political decentralization)

Desentralisasi politik bertujuan meningkatkan keikutsertaan atau partisipasi aktif dari masyarakat, khususnya masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan secara politis. Hal ini menyiratkan bahwa otoritas lokal yang dipilih harus bertanggung jawab terhadap masyarakat lokal yang telah memilihnya dan mereka harus lebih baik mempresentasikan kepentingan lokal dalam pengambilan keputusan politis

2) Desentralisasi Administrasi (administrative decentralization)

Desentralisasi administrasi yaitu pelimpahan wewenang guna mendistribusikan wewenang, tanggung jawab, dan sumber-sumber keuangan untuk menyediakan pelayanan publik, terutama yang menyangkut perencanaan, pendanaan dan manajemen fungsi-fungsi pemerintahan dari pemerintah pusat kepada aparat di daerah, pemerintahan yang lebih rendah, badan otoritas tertentu atau perusahaan tertentu

3) Desentralisasi Ekonomi (economic or market decentralization)

Desentralisasi Ekonomi merujuk pada transfer fungsi pemerintah kepada sektor swasta. Artinya, penugasan yang sebelumnya ditangani oleh pemerintah diserahkan kepada perusahaan swasta, kepentingan kelompok, organisasi yang suka rela dan organisasi bukan pemerintah lainnya

4) Desentralisasi Fiskal (fiscal decentralization)

Desentralisasi fiskal merupakan komponen utama dari desentralisasi, di mana apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran disektor publik maka harus mendapat dukungan dari pemerintah pusat berupa subsidi/bantuan maupun pinjaman dari pemerintah pusat serta sumber-sumber keuangan yang memadai

Ada tiga bentuk variasi desentralisasi fiskal dalam kaitannya dengan derajat kemandirian pengambilan keputusan yang dilakukan di daerah (Alisman & Sufriadi, 2020) yaitu :

1) Desentralisasi, yaitu pemberian pelimpahan wewenang tanggung jawab ke instansi vertikal di daerah atau pemerintah daerah.

2) Devolusi, yaitu pelimpahan yang berhubungan dengan suatu instansi yang bukan hanya implementasi tetapi juga kewenangan untuk memutuskan apa yang perlu dikerjakan di daerah.

3) Delegasi, yaitu daerah dapat bertindak sebagai perwakilan pemerintah pusat untuk melaksanakan fungsi - fungsi dan situasi tertentu atas nama pemerintah pusat.

Alasan perlunya desentralisasi menurut Nurcholis dalam buku (Arenawati, 2014) adalah :

1) Untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada pemerintah pusat yang dapat menimbulkan tirani (semena - mena).

2) Sebagai tindakan pendemokrasian.

3) Dari sudut teknik organisator, mampu menciptakan pemerintahan yang efisien.

4) Dari sudut kultural supaya perhatian sepenuhnya dapat tertuju pada daerah.

5) Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi supaya pemda dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan ekonomi daerah

Menurut (Suparmoko, 2002), tujuan kebijakan desentralisasi adalah :

1) Mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah.

2) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengurangan subsidi dari pemerintah pusat.

3) Mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masing-masing daerah

Beberapa manfaat desentralisasi fiskal adalah :

a. Efisiensi ekonomis

- b. Anggaran daerah untuk pelayanan publik bisa lebih muda disesuaikan dengan preferensi masyarakat setempat dengan tingkat akuntabilitas dan kemauan yang tinggi.
- c. Peluang meningkatkan penerimaan pajak dari pajak daerah
- d. Pemerintah daerah dapat menarik pajak dengan basis konsumsi dan aset yang tidak bisa ditarik oleh pemerintah pusat

Beberapa kelemahan desentralisasi fiskal adalah :

1. Lemahnya kontrol pemerintah pusat terhadap ekonomi makro.
2. Sulitnya menerapkan kebijakan pembangunan ekonomi dengan pemerataan.
3. Sulitnya menerapkan kebijakan stabilitas ekonomi.
4. Besarnya biaya yang harus ditanggung pemerintah daerah daripada keuntungan yang diperoleh

Menurut (Sistiana & Makmur, 2014), derajat desentralisasi fiskal merupakan kemampuan daerah dalam kemandirian fiskal. Suatu daerah dikatakan layak menjadi daerah otonom bila salah satu syaratnya memiliki kemampuan pembiayaan yang berasal dari potensi yang dimilikinya sendiri.

Pengukuran derajat desentralisasi fiskal dilakukan dengan menggunakan pendekatan penerimaan, yaitu perbandingan pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah (Marlina, 2014), dengan rumus:

$$DDF = \frac{PAD}{TPD} \times 100\%$$

Dimana:

- DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal
 PAD = Pendapatan Asli Daerah tahun t
 TPD = Total Penerimaan Daerah tahun t

Selanjutnya, rasio ini dapat dijelaskan dengan melihat skala interval yang ditemukan oleh tim KKPEE UGM (Hanafi & Nugroho, 2009) dalam jurnal (Sistiana & Makmur, 2014), yaitu :

Tabel 1
Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal

DDF (%)	Keterangan
0,00 - 10,00 %	Sangat Kurang
10,01 – 20,00 %	Kurang
20,01 – 30,00 %	Sedang
30,01 – 40,00 %	Cukup
40,01 – 50,00 %	Baik

➤ 50,00 % Sangat Baik

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kemandirian suatu daerah dilihat dari daya kemampuannya untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri. Salah satu sumbernya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun, mengalokasikan dan memanfaatkan potensi sumber keuangan daerahnya dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah sendiri

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 (1) menjelaskan PAD sebagai penerimaan yang diperoleh daerah yang berasal dalam wilayahnya sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan yang sesuai dengan perundang-undangan. PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Gultom, Sinurat & Damanik, 2020)

Usaha dalam meningkatkan PAD mengharuskan daerah untuk tidak menetapkan peraturan tentang pendapatan yang berdampak terhadap peningkatan biaya, menghambat mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa antar daerah, maupun kegiatan ekspor dan impor. Peraturan tentang pendapatan yang berakibat pada ekonomi biaya tinggi merupakan peraturan yang mengatur tentang pengenaan pajak serta retribusi terhadap objek pajak oleh level pemerintah diatas nya. Kondisi ini mampu menurunkan daya saing daerah. Peraturan daerah yang berdampak terhadap penghambatan mobilitas penduduk maupun barang dan jasa dalam retribusi izin masuk, pajak atau retribusi atas pengeluaran atau pengiriman barang dari suatu daerah ke daerah lainnya. Semakin tinggi PAD yang diperoleh suatu daerah maka akan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi didaerah tersebut

Hubungan Antara Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum perekonomian akan mengalami pertumbuhan secara natural dari waktu ke waktu, dengan adanya kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terjadi lebih cepat dan lebih besar dibandingkan secara natural karena kebijakan desentralisasi fiskal bertujuan dalam efisiensi pada sektor publik (Apriesa & Miyasto, 2013). Pertumbuhan ekonomi dan

desentralisasi fiskal mempunyai hubungan secara bersamaan karena adanya beberapa penyebab yaitu pertumbuhan terlihat objek dari desentralisasi fiskal yaitu efisiensi alokasi sumber daya pada sektor publik, kemudian secara tegas tujuan pemerintah dalam mengadopsi kebijakan ini adalah untuk menunjang kenaikan pendapatan per kapita dan terakhir pendapatan per kapita merupakan suatu ukuran yang lebih mudah dan dapat menjelaskan keadaan ekonomi dibandingkan dengan indikator yang lain

Kebijakan desentralisasi fiskal disusun dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang diharapkan melalui efisiensi sumber daya. Berjalan nya desentralisasi fiskal akan membantu pemerintah daerah untuk mengetahui kebutuhan masyarakat sehingga dapat menyediakan pelayanan publik yang maksimal. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pada umumnya bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah karena pemberian wewenang yang lebih luas diharapkan mampu mengoptimalkan potensi ekonomi daerah sehingga memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat dari rata-rata pertumbuhan per kapita

Apabila semakin tinggi desentralisasi fiskal, maka semakin rendah pertumbuhan ekonominya, begitu pula sebaliknya. Peningkatan PAD sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Sektor-sektor industri perlu di optimalkan. Pajak dan retribusi (sebagai komponen terbesar PAD) sangat terkait dengan kegiatan sektor industri. Dengan kata lain pertumbuhan domestik dari sektor ini dapat digunakan untuk mengestimasi besarnya PAD yang akan diterima dan membandingkan nya dengan total pendapatan daerah sebagai gambaran dari derajat desentralisasi fiskal

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang tergambar merupakan konsep untuk mengungkap dan menentukan persepsi keterkaitan hubungan antara variabel yang di teliti dan diuraikan dengan kajian teori yang ditulis. Mengacu pada teori-teori yang telah dituliskan di atas maka secara garis besar penulis akan melihat Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pematangsiantar melalui proses analisis data



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin atau paling tinggi tingkat kebenarannya (Purba, et al, 2021:65). Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah :

1. Tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal Di Kabupaten Samosir masih tergolong sangat kurang

2. $H_0 = b_1 = 0$: Diduga Derajat Desentralisasi Fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Samosir.

$H_1 = b_1 \neq 0$: Diduga Derajat Desentralisasi Fiskal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Samosir.

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup pada penelitian ini adalah Kabupaten Samosir dengan data yang diperoleh melalui BPS Kabupaten Samosir. Kurun waktu pada penelitian ini adalah 3 bulan yaitu bulan September – November 2021 sesuai dengan batas waktu penyelesaian penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yaitu suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menentukan keterangan mengenai Analisis Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Samosir. Penelitian kuantitatif lebih menekankan kepada data-data yang numerikal dalam menganalisisnya dan diolah terlebih dahulu menggunakan metode statistika (Purba et al, 2021)

Desain penelitian adalah pedoman kerja dalam melakukan penelitian yang bertujuan agar penelitian berjalan efektif dan efisien (Suliyanto, 2018).

Desain yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang menyampaikan fakta dengan cara mendeskripsikan dari apa yang dilihat, diperoleh dan yang dirasakan (Purba et al,

2021). Penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang yang memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini untuk melihat Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Samosir. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data Time Series yaitu dalam rentang waktu mulai dari tahun 2005 - 2020. Alat pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat lunak (Software) komputer Eviews 11 dengan menggunakan metode analisis regresi linier sederhana.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ukuran yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan kemampuan faktor-faktor produksi yang merangsang bagi berkembangnya ekonomi daerah dalam skala yang lebih besar.

Dalam pembahasan ini akan diperhatikan berapa besar pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Samosir dari tahun 2006-2020, dimana data yang digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Perkembangan PDRB untuk Kabupaten Samosir selama tahun 2006 - 2020 terus mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Perkembangan PDRB di Kabupaten Samosir secara umum dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Samosir

No	Tahun	PDRB	Laju Pertumbuhan (%)
1	2005	843.596	4,05
2	2006	868.589	3,64
3	2007	908.458	4,59
4	2008	953.851	5,00

5	2009	1.002.459	8,10
6	2010	1.887.722	8,11
7	2011	1.985.577	5,18
8	2012	2.105.648	6,05
9	2013	2.234.008	6,10
10	2014	2.367.103	5,95
11	2015	2.503.779	5,77
12	2016	2.635.768	5,27
13	2017	2.776.847	5,35
14	2018	2.931.698	5,58
15	2019	3.098.741	5,70
16	2020	3.080.432	-0,59

Sumber: BPS Kabupaten Samosir Tahun 2005-2020 (data diolah)

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Samosir selama periode Tahun 2005-2020 adalah sebesar 5,24%. Angka pertumbuhan ini relatif bervariasi. Angka pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada Tahun 2010 sebesar 8,11 %. Sedangkan angka pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar -0,59 %

2. Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)

Menurut (Sistiana & Makmur, 2014), derajat desentralisasi fiskal merupakan kemampuan daerah dalam kemandirian fiskal. Suatu daerah dikatakan layak menjadi daerah otonom bila salah satu syaratnya memiliki kemampuan pembiayaan yang berasal dari potensi yang dimilikinya sendiri. Kemandirian suatu daerah dilihat dari daya kemampuannya untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri. Salah satu sumbernya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun, mengalokasikan dan memanfaatkan potensi sumber keuangan daerahnya dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah sendiri

Apabila semakin tinggi desentralisasi fiskal, maka semakin rendah pertumbuhan ekonominya, begitu pula sebaliknya. Peningkatan PAD sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi daerah yang memungkinkan mendapatkan kenaikan PAD. Sektor - sektor industri perlu di optimalkan. Pajak dan retribusi (sebagai komponen terbesar PAD) sangat terkait dengan kegiatan sektor industri. Adapun perkembangan PAD dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3
DDF Kabupaten Samsir Tahun 2005-2020

No	Tahun	PAD	TPD	DDF	Keterangan
1	2005	6.102	115.242	5,29	Sangat Kurang
2	2006	10.302	238.886	4,31	Sangat Kurang
3	2007	13.367	299.878	4,46	Sangat Kurang
4	2008	9.360	327.530	2,86	Sangat Kurang
5	2009	14.856	355.763	4,18	Sangat Kurang
6	2010	26.112	375.422	6,96	Sangat Kurang
7	2011	14.201	415.920	3,41	Sangat Kurang
8	2012	17.460	447.732	3,90	Sangat Kurang
9	2013	26.661	529.781	5,03	Sangat Kurang
10	2014	43.718	611.734	7,15	Sangat Kurang
11	2015	34.303	678.498	5,06	Sangat Kurang
12	2016	28.650	768.445	3,73	Sangat Kurang
13	2017	72.229	823.802	8,77	Sangat Kurang
14	2018	47.441	803.890	5,90	Sangat Kurang
15	2019	58.431	828.991	7,05	Sangat Kurang
16	2020	69.296	901.339	7,69	Sangat Kurang

Sumber: BPS Samsir Dalam Angka Tahun 2005-2020 (data diolah)

Dari tabel diatas diketahui bahwa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Samsir selama periode Tahun 2005-2020 yaitu sebesar 5,53 %, yang berarti bahwa anggaran pendapatan di Kabupaten Samsir selama tahun penelitian dapat dikatakan sangat kurang karena berada sangat jauh dibawah skala 20%.

DDF sangat bervariasi jumlahnya karena tidak stabil (naik turun). DDF tertinggi terjadi pada Tahun 2017 yaitu 8,77% dan terendah terjadi pada Tahun 2008 yaitu 2,86%.

Pengujian Asumsi Klasik

1. Uji Autokorelasi

Tabel 4
Uji Autokorelasi Menggunakan LM Test

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	5.822136	Prob. F(2, *2)	0.0571
Obs*R-squared	7.879619	Prob. Chi-Square(2)	0.0595

Sumber : Olahdata, 2021

Dari hasil uji autokorelasi diatas dengan menggunakan LM Test dapat diketahui bahwa prob 0,59 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi dalam model penelitian.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas Menggunakan White Test

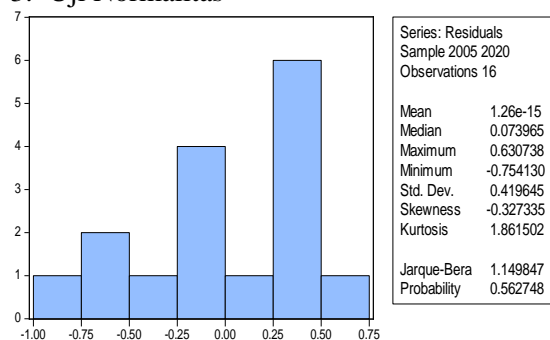
Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	2.394259	Prob. F(2, 13)	0.0913
Obs*R-squared	4.929409	Prob. Chi-Square(2)	0.0850
Scaled explained SS	1.525668	Prob. Chi-Square(2)	0.4436

Sumber : Olahdata, 2021

Dari tabel diatas diketahui bahwa prob adalah 0,09 > 0,05, artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas

3. Uji Normalitas



Gambar 2

Uji Normalitas Menggunakan Normal Probability Plot

Sumber : Olahdata, 2021

Dari hasil pengujian diatas dapat diketahui bahwa nilai probability sebesar 0,56 > 0,05, artinya residual data penelitian terdistribusi secara normal

Regresi Linier Sederhana

Tabel 5

Hasil regresi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Analisis Regresi Linier Sederhana

Dependent Variable: PDRB
Method: Least Squares
Date: 10/16/21 Time: 22:57
Sample: 2005 2020
Included observations: 16

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	13.56668	0.366165	37.05069	0.0000
DDF	0.157444	0.065249	2.412979	0.0301
R-squared	0.293731	Mean dependent var		14.41048
Adjusted R-squared	0.243283	S.D. dependent var		0.499341
S.E. of regression	0.434374	Akaike info criterion		1.286648
Sum squared resid	2.641535	Schwarz criterion		1.383222
Log likelihood	-8.293187	Hannan-Quinn criter.		1.291594
F-statistic	5.822467	Durbin-Watson stat		0.643185
Prob(F-statistic)	0.030111			

Sumber : Olahdata, 2021

$$Y = a + \beta X + e$$

$$Y = 13.56668 + 0.157444 X_1 + e$$

Persamaan regresi menunjukkan bahwa variabel X (Derajat Desentralisasi Fiskal) berpengaruh positif terhadap variabel Y (Pertumbuhan Ekonomi).

Dari regresi di atas maka dapat diinterpretasikan hasil penelitian:

1. Nilai koefisien konstanta sebesar 13.56668, artinya jika variabel DDF bernilai 1% maka Pertumbuhan Ekonomi akan meningkat sebesar 13.66267%.
2. Nilai koefisien DDF sebesar 0.157444, artinya jika DDF meningkat 1% maka diharapkan Pertumbuhan Ekonomi akan meningkat sebesar 0.157444% dengan asumsi variabel lain tetap

Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji t)

Dari hasil analisis regresi pada tabel 4.10 diketahui bahwa t-statistic DDF sebesar 2.412979 dengan Prob sebesar 0.0301 dimana < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, artinya DDF berpengaruh parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Samosir

Tabel 7
Hasil Uji Hipotesis

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	13.56668	0.366165	37.05069	0.0000
DDF	0.157444	0.065249	2.412979	0.0301
R Square (Adjusted)	0.243283	Adjusted R Square (Adj. R ²)	0.243283	
Koefisien Determinasi	0.293731			

Sumber: Eviews 11 (data diolah)

2. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Nilai variabel R-squared pada tabel regresi linier sederhana menunjukkan bahwa besarnya yaitu 0.293731, menunjukkan bahwa proporsi pengaruh variabel DDF terhadap Pertumbuhan Ekonomi sebesar 29,37%. Artinya variasi dari DDF dapat menjelaskan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 29,37%, sedangkan sisanya 70,63% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam model regresi

Pembahasan

1. Derajat Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Samosir

Derajat desentralisasi fiskal merupakan tingkat kemampuan daerah dalam kemandirian fiskal. Suatu daerah dikatakan layak menjadi daerah otonom bila salah satu syaratnya memiliki kemampuan pembiayaan yang berasal dari potensi yang dimilikinya sendiri.

Apabila semakin tinggi desentralisasi fiskal, maka semakin rendah pertumbuhan ekonominya, begitu pula sebaliknya. Dengan kata lain pertumbuhan domestik dari sektor ini dapat digunakan untuk mengestimasi besarnya PAD yang akan diterima dan membandingkannya dengan total pendapatan daerah sebagai gambaran dari derajat desentralisasi fiskal.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Samosir selama periode Tahun 2005-2020 yaitu sebesar 5,53 %, yang berarti bahwa anggaran pendapatan di Kabupaten

Samosir selama tahun penelitian dapat dikatakan sangat kurang karena berada sangat jauh dibawah skala 20%. DDF tertinggi terjadi pada Tahun 2017 yaitu 8,77% dan terendah terjadi pada Tahun 2008 yaitu 2,86%. Dari skala interval derajat desentralisasi fiskal, daerah otonom harus memiliki tingkat derajat desentralisasi fiskal minimal 20%. Rata - rata tingkat derajat desentralisasi fiskal di Kabupaten Samosir dalam kurun waktu 15 tahun yaitu tahun 2005-2020 hanya 5,53%.

Hasil penelitian yang sama yaitu (Enceng, et al, 2012) yang menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal di Kabupaten Purworejo masih sangat rendah. Yang diukur dengan menggunakan tingkat DDF dari rasio PAD terhadap TPD rata-rata sebesar 7,99% selama 3 tahun (2008-2010). Sama juga dengan hasil penelitian (Sistiana & Makmur, 2014) yang menunjukkan bahwa DDF kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2006 - 2010 termasuk kategori sangat rendah dengan rata - rata persentase DDF sebesar 8%. Sama juga dengan penelitian (Al-Aksari, 2014) yang menunjukkan bahwa nilai DDF di Kabupaten Bungo periode 2003-2013 termasuk kategori sangat rendah yaitu dengan rata - rata persentase DDF sebesar 8,6%. Penelitian (Soleh et al, 2018) yang menunjukkan bahwa nilai DDF di Kota Jambi termasuk kategori kurang yaitu dengan rata - rata persentase DDF sebesar 12,11%

2. Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Samosir

Dari hasil analisis regresi dapat disimpulkan bahwa H1 diterima H0 ditolak, artinya DDF berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Samosir.

Apabila semakin tinggi desentralisasi fiskal, maka semakin rendah pertumbuhan ekonominya, begitu pula sebaliknya. Dengan kata lain pertumbuhan domestik dari sektor ini dapat digunakan untuk mengestimasi besarnya PAD yang akan diterima dan membandingkannya dengan total pendapatan daerah sebagai gambaran dari derajat desentralisasi fiskal.

Artinya peranan PAD Kabupaten Samosir terhadap pendapatan daerah masih rendah sehingga Kabupaten Samosir dikatakan belum mandiri secara fiskal. Dengan rendahnya PAD maka daerah dihadapkan pada permasalahan yang rumit dan dikatakan belum berhasil dalam

pelaksanaan otonomi daerah. DDF salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah secara keseluruhan, karena DDF menggambarkan kemampuan pemerintah dalam meningkatkan PAD seperti pajak, retribusi, dan lain-lain. Namun, harus diakui DDF di Kabupaten Samosir masih rendah, artinya daerah belum mampu membiayai pengeluaran daerahnya secara mandiri. Karena itu otonomi daerah bisa diwujudkan apabila disertai keuangan yang efektif.

Hasil penelitian (Faridi, 2011), (Alisman & Sufriadi, 2020) menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Tetapi dalam penelitian (Soleh, 2018), (Astuti, et al, 2018) menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka menghasilkan kesimpulan yaitu:

1. Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) di Kabupaten Samosir masih sangat jauh dari skala 20%, yaitu hanya 5,53% artinya masih tergolong sangat kurang
2. Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Samosir. Nilai koefisien DDF sebesar 0,157444, artinya jika DDF meningkat 1 satuan maka Pertumbuhan Ekonomi akan meningkat sebesar 0,157444 satuan dengan asumsi variabel lain tetap.
3. Koefisien Determinasi (R²) menunjukkan bahwa nilai variabel R-squared pada tabel regresi linier sederhana menunjukkan bahwa besarnya yaitu 0,293731, menunjukkan bahwa variasi variabel DDF dapat menjelaskan variabel Pertumbuhan Ekonomi sebesar 29,37%. Artinya DDF terhadap Pertumbuhan Ekonomi dapat dijelaskan sebesar 29,37%, sedangkan sisanya 70,63% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam model regresi

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka saran yang diberikan penulis yaitu:

- a. Pemerintah Kabupaten Samosir seharusnya melakukan upaya yang intensif untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya terutama yang bersumber dari pajak dan

DOI : 10.36985/ekuilnomi.v4i1.339

retribusi daerah agar derajat desentralisasi fiskal semakin meningkat.

- b. Pemerintah Kabupaten Samsir perlu menetapkan kebijakan pembangunan dengan prioritas produk unggulan, dan sektor unggulan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang diukur dari tingkat penerimaan PDRB Kabupaten Samsir. Pemerintah Kabupaten Samsir perlu menetapkan kebijakan pembangunan dengan prioritas produk unggulan dengan mengingat sektor jasa memiliki pengaruh yang besar terhadap sektor-sektor lainnya

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Aksari, S. (2014). Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bungo. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Alisman, Alisman, & Sufriadi, Dedi. (2020). Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Barat Selatan Provinsi Aceh Periode Tahun 2011-2019. *Jurnal EMT KITA*, 4(1), 71. <https://doi.org/10.35870/emt.v4i2.133>
- Apriesta, Lintangia Fajar, & Miyasto. (2013). Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Ketimpangan Pendapatan (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Diponegoro Journal of Economics*, 2(1), 1–12. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jme/article/view/1916/1914>
- Arenawati. (2014). *Administrasi Pemerintah Daerah, Sejarah, Konsep dan penatalaksanaan di Indonesia* (Ed Pertama). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bahl, R. W. & Linh, J. (1992). *Urban Finance In Development Countries*. New York: Oxford University Press.
- Basmar, Edwin, Sartika, Sri Hardianti, Suleman, Abdul Rahman, Faried, Annisa Iلمي, Damanik, Darwin, Amruddin, Amruddin, Purba, Bonaraja, Wisnujati, Nugrahini Susantinah, & Nugraha, Nur Arif. (2021). Ekonomi Pembangunan: Strategi dan Kebijakan. In *Yayasan Kita Menulis*. Retrieved from https://www.google.co.id/books/edition/Ekonomi_Pembangunan_Strategi_dan_Kebijakan/hPpTEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=teori+pertumbuhan+ekonomi&printsec=frontcover
- Bird, R. M., Ebel, R. D., & Wallich, C. I. (1995). Decentralization of the socialist state: intergovernmental finance in transition economies. *Decentralization of the Socialist State: Intergovernmental Finance in Transition Economies*, 443.
- BIRD, RICHARD M. (1993). THREADING THE FISCAL LABYRINTH: SOME ISSUES IN FISCAL DECENTRALIZATION. *National Tax Journal*, 46(2), 207–227. <https://doi.org/10.1086/ntj41789011>
- Breuss, Fritz, & Eller, Markus. (2004). Fiscal decentralisation and economic growth: Is there really a link? *Journal for Institutional Comparisons*, 2(1), 3–9. Retrieved from [http://fritz.breuss.wifo.ac.at/Breuss_Eller_CESifo_DICE_Report_2\(1\)_2004.PDF](http://fritz.breuss.wifo.ac.at/Breuss_Eller_CESifo_DICE_Report_2(1)_2004.PDF)
- Dama, Himawan Yudistira, Lopian, Agnes L.Ch, Sumual, Jacline I., Pembangunan, Jurusan Ekonomi, Ekonomi, Fakultas, Sam, Universitas, & Manado, Ratulangi. (2016). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Manado (Tahun 2005-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(3), 549–561.
- Damanik, D., Purba, E., & Hutabarat, A. S. (2021). The Effect of Population and Human Development Index on Economic Growth Pematangsiantar City. ... *International Research and ...*, 3658–3668. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Darwin-Damanik/publication/353348773_The_Effect_of_Population_and_Human_Development_Index_on_Economic_Growth_Pematangsiantar_City/links/60f6e5b19541032c6d546b92/The-Effect-of-Population-and-Human-Development-Index-on-E
- Faridi, M. Z. (2011). Contribution of Fiscal Decentralization to Economic Growth: Evidence from Pakistan. *Pakistan Journal of Social Sciences*, 31(1), 1–13.
- Gramlich, E. (1993). A Policy Maker's Guide To Fiscal Decentralization. *National Tax Journal*, 229–235.
- Habib, Muhammad. (2020). Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Fakultas Ekonomi Bisnis, Ekonomi Pembangunan*, (2004), 6.
- Hanafii, Imam dan Nugroho, T. (2009).

- Kebijakan Keuangan Daerah: Reformasi dan Model Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia*. Malang: UB Press.
- Hidayat, Syarif. (2005). *Too Much Too Soon; Local States Elite's Perspective on The Puzzle Of Contemporary Indonesian Regional Autonomy Policy*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hirawan, S. B. (2007). *Desentralisasi fiskal sebagai suatu upaya meningkatkan layanan publik (bagi orang miskin) di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ismanto, Bambang, Kristiani, Mita Ayu, & Rina, Lelahester. (2019). Pengaruh Kurs dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2007-2017. *Jurnal Ecodunamika*, 2(1), 1-6. Retrieved from <https://ejournal.uksw.edu/ecodunamika/article/view/2279>
- Kharisma, Bayu. (2013). DESENTRALISASI FISKAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI: SEBELUM DAN SESUDAH ERA DESENTRALISASI FISKAL DI INDONESIA. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 14(2), 101-119. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/286798-pengaruh-belanja-pegawai-belanja-barang-03d72f3f.pdf>
- M. Suparmoko. (2002). Ekonomi publik untuk keuangan dan pembangunan daerah. In *Monograf*.
- Marlina. (2014). Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal, Elastisitas, Efisiensi, dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Aceh. *JSEB*, 1(1).
- Martinez-Vazquez, Jorge, McNab, Robert, & Georgia State University. (1997). Fiscal Decentralization, Economic Growth, and Democratic Governance. *Georgia State University, International Studies Program Working Paper*, 97-7(October), 43.
- Miswati Gultom, Anggiat Sinurat, & Darwin Damanik. (2020). ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PEMATANGSIANTAR. *Jurnal Ekuilnomi*, 2(1), 12-17. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v2i1.347>
- Muryawan, Sang Made, dan Made Sukarsa. 2016. Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Fiscal Stress, dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. E-jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Vol 5, No 2
- Muta'ali, Lutf. (2015). *Teknik Analisis Regional Untuk Perencanaan Wilayah Tata Ruang dan Lingkungan*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPPG).
- Muttaqin, Rizal. (2018). Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam Economic Growth in Islamic Perspective. *Maro, Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 1(2), 117-122. Retrieved from <http://jurnal.unma.ac.id/index.php/Mr/index>
- OATES, WALLACE E. (1993). FISCAL DECENTRALIZATION AND ECONOMIC DEVELOPMENT. *National Tax Journal*, 46(2), 237-243. <https://doi.org/10.1086/ntj41789013>
- Pasaribu, Esti, et al. 2021. Analisis Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu: Pendekatan Derajat Desentralisasi Fiskal. *AKUNTABILITAS*, Vol 15, No 1
- Peterson, G. E. (1997). Decentralization in Latin America: learning through experience. In *Decentralization in Latin America: learning through experience*.
- Phillips, K. L., & Woller, G. (1997). *Does fiscal decentralization lead to economic growth?*
- Prud'homme, Rémy. (1995). The dangers of decentralization. *World Bank Research Observer*, 10(2), 201-220. <https://doi.org/10.1093/wbro/10.2.201>
- Purba, Elidawaty; dkk. (2021). Metode Penelitian Ekonomi. In *google book* (p. 89).
- Rahajeng, Anggi. (2015). *Perencanaan Penganggaran Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rahayu, Sri Endang, et al. (2016). *Pengantar Ekonomi Makro*. Medan: Perdana Publishing.
- Sadono Sukirno. (2016). Teori Pengantar Makroekonomi. In *Rajawali Press*.
- Saputra, Bambang. (2013). Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Borneo Administrator*, 9(1), 96-111. Retrieved from <http://samarinda.lan.go.id/jba/index.php/jba/article/view/100>
- Saputra, Bambang, & Mahmudi. (2012).

DOI : 10.36985/ekuilnomi.v4i1.339

- Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat DI Provinsi Papua Tahun 1997-2013. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 16(1993), 185–199. Retrieved from <http://eprints.upnyk.ac.id/871/>
- Shen, Chunli, Zhao, Xiaojun, & Zou, Heng Fu. (2014). Fiscal decentralization and public services provision in China. *Annals of Economics and Finance*, Vol. 15, pp. 135–160.
- Sistiana, M., & Makmur, M. H. (2014). Derajat desentralisasi fiskal daerah kabupaten/kota. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 12(4), 277–286. Retrieved from <https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/view/2216>
- Soleh, Ahmad, Iwan EP dan Nurdin. (2018). *Potret Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi dan Kota Jambi*. Jambi: CV.Salim Media Indonesia.
- Suliyanto. (2018). *Metode Penelitian Bisnis untuk Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Yogyakarta: Andi.
- Suparmoko, M. 2016. *Ekonomi Publik untuk Keuangan & Pembangunan Daerah*, Edisi Pertama. Yogyakarta: ANDI
- Sutriani, S., & Damanik, D. (2022). ANALISIS PENGARUH DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA PEMATANGSIANTAR. *JEpa*, 7(1), 38-50. Retrieved from <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/3920>
- Wibowo, Puji. (2008). Mencermati Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Keuangan Publik*, 5(1), 55–84.
- Xie, Biao, Davidson III, Wallace N., & DaDalt, Peter J. (2003). Earnings Management and Corporate Governance in the UK: the Role of the Board of Directors and Audit Committee. *Journal of Corporate Finance*, 9(3), 295–316.
- Yoshanda, Agung Andana. (2020). PENDAPATAN NASIONAL. *Jurnal Umsida*, 148, 148–162. Retrieved from <http://eprints.umsida.ac.id/id/eprint/6990>
- Zhang, Tao, & Zou, Heng fu. (1998). Fiscal decentralization, public spending, and economic growth in China. *Journal of Public Economics*, 67(2), 221–240. [https://doi.org/10.1016/S0047-2727\(97\)00057-1](https://doi.org/10.1016/S0047-2727(97)00057-1)
- Zhang, Tao, & Zou, Heng Fu. (2001). The growth impact of intersectoral and intergovernmental allocation of public expenditure: With applications to China and India. *China Economic Review*, 12(1), 58–81. [https://doi.org/10.1016/S1043-951X\(01\)00043-8](https://doi.org/10.1016/S1043-951X(01)00043-8)